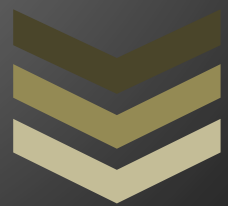


LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan
Makanan

2018

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*); dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dari penyelenggara negara dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi perlu adanya laporan kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2018, Direktorat Pengawasan Kosmetik telah menyelesaikan serangkaian kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Kosmetik 2015 - 2019 yang telah ditetapkan.



bebas

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik selama tahun anggaran 2018 yang berorientasi pada hasil, kami telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2018 sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Demikian laporan kami ini untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2018.

Jakarta, Februari 2019
Direktur Pengawasan Kosmetik

Drs. Arustiyono, Apt., MPH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR GAMBAR.....	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR LAMPIRAN	V
BAB I	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Permasalahan Utama (Strategic Issue).....	5
BAB II	6
A. Rencana Strategis Organisasi Tata Kerja (OTK) Baru	6
B. Perjanjian Kinerja.....	7
Cara pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama.....	11
BAB III	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Realisasi Anggaran	21
Tingkat Efisien	26
BAB IV	29
PENUTUP	29
KESIMPULAN	29
RENCANA PERBAIKAN KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN TAHUN 2018.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik	2
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Sasaran Kegiatan	14
Tabel 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	15
Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	15
Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	16
Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	17
Tabel 6. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	18
Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	21
Tabel 8. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	31
Lampiran 2	34
Lampiran 3	37
Lampiran 4	44
Lampiran 5	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Pengawasan Kosmetik masih bergabung dengan menjadi satu dengan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Bab VI Pasal 226, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kosmetik

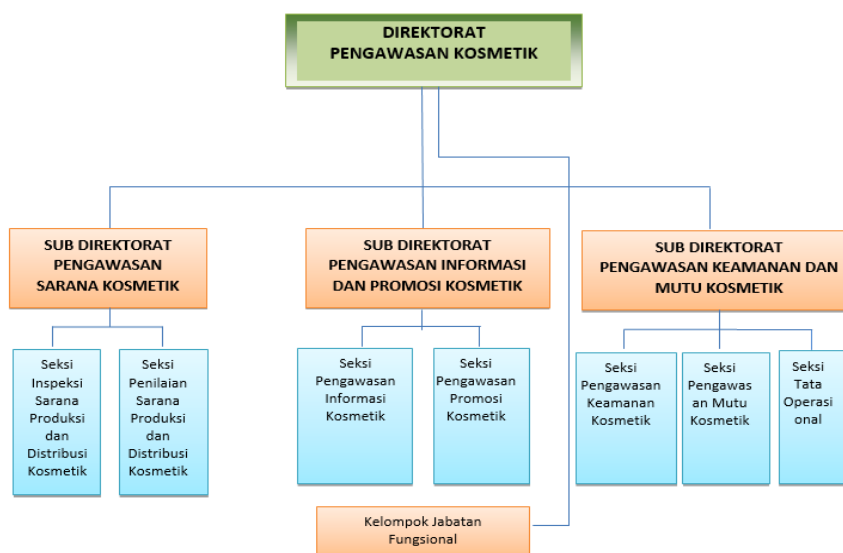
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan dan mutu kosmetik;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik;
- e. pelaksanaan inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik;
- f. pengambilan contoh (sampling) di sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik;
- g. pelaksanaan pengawasan informasi dan promosi kosmetik;
- h. pelaksanaan surveilan kosmetik;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik; dan
- j. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik

Dilihat dari fungsinya, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan kosmetik melalui peningkatan inspeksi dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi kosmetik dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practices* (GDP) kosmetik terkini.
2. Pengawasan kosmetik pasca beredar di masyarakat (*post-market*) melalui:
 - Pengambilan sampel dan pengujian;
 - Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik serta promosi di media massa dan media elektronik.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik di pusat dan balai melalui:
 - *Public warning*;
 - Pemberian Informasi, bimbingan teknis dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang kosmetik.

Tupoksi Direktorat Pengawasan Kosmetik sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; dan pada butir 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta butir 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Direktorat Pengawasan Kosmetik ke depan akan menjalankan tugasnya secara lebih proaktif dan terdepan dalam melindungi masyarakat Indonesia melalui peningkatan pengawasan kosmetik.

C. Aspek Strategis Organisasi

Era globalisasi membuka peluang peningkatan jumlah produk kosmetik Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik.

Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk kosmetik dari luar negeri, namun harus terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam menggunakan kosmetik,

Indonesia memiliki pasar kosmetik yang cukup besar. Dalam rangka melindungi industri kosmetik khususnya UMKM kosmetik di Indonesia terhadap gempuran produk kosmetik dari negara luar diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memajukan UMKM kosmetik di Indonesia. Ketersediaan kosmetik di pasaran dengan harga terjangkau memerlukan dukungan Pemerintah, dimana kosmetik yang beredar di pasaran bermutu, aman dan bermanfaat sehingga mampu bersaing dengan kosmetik impor.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan antara lain distribusi kosmetik ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antisipasi pengawasan kosmetik dan juga harus sama cepatnya. Bagi pengawasan kosmetik, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri kini juga mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Disamping itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, maka segala informasi tentang kosmetik akan dengan mudah diperoleh, bahkan cara pembeliannya pun cukup dengan menggunakan komputer dan perangkat seluler saja. Direktorat Pengawasan Kosmetik memiliki pelayanan publik yang berupa pelayanan sertifikasi kosmetik. Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Pengawasan Kosmetik telah menerapkan pelayanan secara *online* untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia.

Direktorat Pengawasan Kosmetik menyadari dalam pengawasan kosmetik tidak dapat dilakukan sendiri atau menjadi *single player*. Untuk itu Direktorat Pengawasan Kosmetik dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah).

D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Permasalahan utama dalam pengawasan kosmetik pada periode tahun 2018 yaitu:

1. Meningkatnya secara drastis temuan kosmetik TMS di tahun 2018 dibandingkan obat dan makanan TMS sebesar Rp. 126 M.
2. Kosmetik TMS dan ilegal yg diiklankan secara online semakin marak.
3. Maraknya Publik figur sebagai endorser kosmetik ilegal.
4. Banyak generasi milenial yg belum mengetahui pemilihan dan penggunaan kosmetik aman dan mudah tergiur iklan kosmetik ilegal secara online.
5. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin kosmetik yang diedarkan terjamin mutu dan bermanfaat bagi masyarakat.
6. Kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi dengan lintas sektor terkait pentingnya pengawasan kosmetik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi Tata Kerja (OTK) Baru

Dengan adanya perubahan organisasi Badan POM, Direktorat Pengawasan Kosmetik sebagai unit baru merupakan pecahan dari Direktorat Insert OT, Kosmetik dan PK. Namun ada beberapa indikator kinerja yang hampir sama dengan indikator lama, tetapi berubah kriteria, sebagai berikut:

Indikator lama:

1. **Persentase permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu**
2. **Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan**

Indikator baru:

1. **Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu**
2. **Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik**

Perencanaan Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2015 - 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik Nomor **HK.04.05.44.10.18.4333 tanggal 9 Oktober 2018**. Renstra tersebut berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran kegiatan, target tahunan, arah kebijakan dan strategi yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2015 - 2019.

B. Perjanjian Kinerja

Tujuan adanya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2018 Direktorat Pengawasan Kosmetik menggunakan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2015-2019, dan ada beberapa penyesuaian dengan adanya perubahan Organisasi Tata Kerja (OTK).

PERJANJIAN KINERJA OTK LAMA

JANUARI - FEBRUARI 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan sesuai <i>Good manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Good Distribution Practices</i> (GDP)	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional yang memiliki sertifikat CPOTB	95
	Persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu atau diverifikasi	12,5%
	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	230
	Persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan TMS yang ditindaklanjuti berdasar hasil pengawasan	87,5%
	Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi	64.550
	Persentase berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan	76%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	
Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang sesuai GMP dan GDP	Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi	-
	Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan	340
Kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu	Persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti	-
	Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan	790
	Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional , Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	-
	Persentase permohonan sertifikasi OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	85
Penandaan label dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi	Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti	-
	Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	5.100
	Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	10.150
	Jumlah label kosmetik yang diawasi	10.100
	Jumlah iklan kosmetik yang diawasi	21.150

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Pelaku usaha menjamin mutu produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	95
	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	230

Anggaran. Rp 12.633.086.000,-

PERJANJIAN KINERJA OTK BARU

MARET - JUNI 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2018
Meningkatnya kosmetik yang aman, bermanfaat dan bermutu melalui pengawasan sarana dan produk	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60%
	Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik	60%
	Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetik	60%
	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	86%
	Persentase laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	65%

Anggaran Rp. 2.219.532.550,-

PERJANJIAN KINERJA BARU

JULI - DESEMBER 2018

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	75
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik	Indeks kepatuhan sarana produksi kosmetik	60
		Indeks kepatuhan sarana distribusi kosmetik	60
3	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	86%
4	Meningkatnya kualitas pembinaan terkait kosmetik	Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetik	60%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik berbasis risiko	Ratio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan	55
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60%
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Kosmetik	60%
		Persentase laporan efek samping Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	65%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik sesuai dengan <i>road map</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik	78

Anggaran Rp 10.173.432.000

Cara pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama

Penilaian capaian indikator kinerja utama dihitung berdasarkan:

1. **Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik** adalah ukuran untuk menilai tingkat efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Inspektorat Utama.
2. **Indeks kepatuhan sarana produksi kosmetik** adalah pemenuhan ketentuan bagi pelaku usaha sarana produksi kosmetik.
3. **Indeks kepatuhan sarana distribusi kosmetik** adalah pemenuhan ketentuan bagi pelaku usaha sarana distribusi kosmetik.
4. **Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu** adalah jumlah berkas permohonan penilaian produk dan sarana kosmetik yang mendapat keputusan tepat waktu dibagi jumlah berkas permohonan penilaian produk dan sarana kosmetik yang diterima selama tahun 2018.
5. **Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu** adalah jumlah keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu dibagi total keputusan hasil pengawasan kosmetik tidak memenuhi ketentuan pada tahun 2018.
6. **Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetik** adalah jumlah Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetik dibagi dengan jumlah Balai seluruh Indonesia pada tahun 2018.
7. **Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan** adalah jumlah *feedback* dibandingkan dengan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM (Pusat dan Balai) dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan POM (Pusat dan Balai) yang diberikan kepada instansi terkait.
8. **Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik** adalah jumlah pendalaman mutu hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi

kosmetik dibagi dengan jumlah sarana produksi dan sarana distribusi yang diperiksa pada tahun 2018.

9. **Persentase jumlah laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu** adalah jumlah laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan efek samping kosmetik yang masuk selama tahun 2018.
10. **Nilai hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik** adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya,

dengan ketentuan sebagai berikut:

“ Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran”.

Dalam buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja (X) yang digunakan adalah:

MEMUASKAN	$100\% \leq x \leq 125\%$
BAIK	100%
CUKUP	$75\% \leq x < 100\%$
KURANG	$x < 75\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 125\%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2018 telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Capaian Sasaran Direktorat Pengawasan Kosmetik setelah dihitung menggunakan cara Perhitungan Nilai Pencapaian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Pencapaian Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran	Kriteria
1	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	117,13%	Memuaskan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik	104,13%	Memuaskan
3	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	106,73%	Memuaskan
4	Meningkatnya kualitas pembinaan terkait kosmetik	106,06%	Memuaskan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik berbasis risiko	103,63%	Memuaskan
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik sesuai dengan <i>road map</i> RB BPOM 2015 - 2019	89,92%	Cukup

Sesuai dengan Renstra Direktorat Pengawasan Kosmetik 2015-2019, maka tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2015-2019 sebagai unit baru, sehingga perlu dilakukan analisis capaian indikator kinerja tahun 2018. Capaian tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Pengawasan Kosmetik berbeda dari indikator unit kerja sebelumnya Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat

Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Hasil evaluasi dan analisis terhadap target dan realisasi indikator kinerja tahun 2018 pada Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Kegiatan “MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP LAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENGAWASAN KOSMETIK”

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur berdasarkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memperoleh Nilai Capaian Sasaran 117,13% dengan kriteria **Memuaskan**.

Realisasi indikator kinerja ini hanya membandingkan antara target dan realisasi di tahun 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	75	87,85	117,13%	Memuaskan

Indikator ini tidak diukur pada unit lama Direktorat Insert OT, Kosmetik dan PK. Maka di tahun 2018, Direktorat Pengawasan Kosmetik sebagai unit baru, belum mempunyai indeks baseline sebagai target indikator kinerja terkait Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik. Target yang ditetapkan berdasarkan target kepuasan pelayanan publik di bidang kosmetik yang dilakukan oleh Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik.

2. Capaian Sasaran Kegiatan “MENINGKATNYA KEPATUHAN PELAKU USAHA KOSMETIK”

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memperoleh Nilai Capaian Sasaran 104,13% dengan kriteria **Memuaskan**.

Realisasi indikator kinerja ini hanya membandingkan antara target dan realisasi di tahun 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
2. Indeks kepatuhan sarana produksi kosmetik	60	85,21	142,02%	Tidak dapat disimpulkan
3. Indeks kepatuhan sarana distribusi kosmetik	60	57,28	95,47%	Cukup

Kedua IKU ini juga sebelumnya tidak diukur pada unit lama Direktorat Insert OT, Kosmetik dan PK. Hal ini menyebabkan Direktorat Pengawasan Kosmetik sebagai unit baru, menetapkan target indikator kinerja ini berdasarkan nilai minimum yang termasuk kriteria **Baik** untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik”. Indeks kepatuhan pelaku usaha skala nasional pada Lampiran 3.

3. Capaian Sasaran Kegiatan “MENINGKATNYA KETEPATAN WAKTU PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENGAWASAN KOSMETIK”

Pencapaian sasaran kegiatan diukur berdasarkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Nilai Capaian Sasaran 101,04% yang memenuhi kriteria **Memuaskan**.

Realisasi indikator kinerja ini hanya membandingkan antara target dan realisasi di tahun 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
4. Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	86%	86,89%	101,04%	Memuaskan

Pada tahun 2018, diperoleh jumlah berkas permohonan penilaian sarana kosmetik yang mendapatkan keputusan tepat waktu sejumlah 223 berkas dari 250 berkas permohonan penilaian sarana kosmetik yang diterima. Sedangkan

jumlah berkas permohonan penilaian produk kosmetik yang mendapatkan keputusan tepat waktu sejumlah 18.527 berkas dari 21.328 berkas permohonan penilaian produk kosmetik yang diterima.

Berdasarkan data realisasi tersebut diatas, Persentase Permohonan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetik yang diselesaikan Tepat Waktu sebesar 86,89% dari target tahun 2018 sebesar 86,00%. Dengan demikian persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 101,04%.

4. Capaian Sasaran Kegiatan “MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN TERKAIT KOSMETIK”

Pencapaian sasaran kegiatan diukur berdasarkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Nilai Capaian Sasaran 106,06% yang memenuhi kriteria **Memuaskan**.

Realisasi indikator kinerja ini hanya membandingkan antara target dan realisasi di tahun 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
5. Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetik	60%	63,64%	106,06%	Memuaskan

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah Peningkatan Kompetensi / Bimbingan Teknis kepada Petugas Balai/Balai Besar POM dan Penilaian Kinerja Balai.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi antara Unit Pusat dengan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia, dimana komunikasi tersebut berupa peningkatan kemampuan pengawasan petugas dalam upaya meningkatkan mutu hasil pengawasan. Balai Besar/Balai POM adalah unit yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kosmetik di wilayahnya dan Direktorat Pengawasan Kosmetik mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan Balai.

Tahun 2018, Direktorat Pengawasan Kosmetik telah melaksanakan bimbingan kepada 21 BB/Balai POM dari 33 Propinsi yang ada. Hal ini dapat tercapai, karena dari ke 3 subdit melaksanakan bimbingan secara sinergis.

Tahun 2019, akan dilaksanakan bimbingan *in-depth* terhadap BB/Balai POM lainnya termasuk akan diprioritaskan terhadap beberapa Loka di wilayah Indonesia.

5. Capaian Sasaran Kegiatan “MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOSMETIK BERBASIS RISIKO”

Pencapaian sasaran kegiatan diukur berdasarkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Nilai Capaian Sasaran 103,93% yang memenuhi kriteria **Memuaskan**.

Realisasi indikator kinerja ini hanya membandingkan antara target dan realisasi di tahun 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
6. Ratio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan	55	55,11	100,20%	Memuaskan
7. Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60%	66,72%	111,20%	Memuaskan
8. Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik	60%	60,49%	100,81%	Memuaskan
9. Persentase laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	65%	66,50%	102,30%	Memuaskan

➤ **Ratio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan**

Indikator ini tidak diukur pada unit lama Direktorat Insert OT, Kosmetik dan PK. Dengan demikian untuk Tahun 2018, Direktorat Pengawasan Kosmetik belum mempunyai indeks baseline sebagai target indikator kinerja ini. Target yang ditetapkan karena pelaksanaan Perjanjian Kinerja sesuai dengan PK dan anggaran OTK Baru dimulai pada pertengahan tahun 2018, sehingga diambil batas nilai sedikit di atas 50. IKU ini meliputi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi, hasil pengawasan iklan dan label, hasil pengujian produk, penanganan kasus termasuk pengaduan konsumen.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 793 Surat TL/Peringatan terhadap sarana, dan mendapat *feedback* sebanyak 437 surat tanggapan sarana.

Capaian ini cukup rendah, dimana kemungkinan terjadi sarana yang bersangkutan tidak mempunyai alamat yang benar, sarana terlambat menerima Surat TL/Peringatan, ataupun ada juga yang tidak mengerti untuk memberikan tanggapan dan melaksanakan instruksi dalam surat dari Badan POM.

➤ **Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu**

IKU ini meliputi Hasil Keputusan yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap Jumlah keputusan pengawasan kosmetik TMK berdasarkan hasil sampling, serta Jumlah Iklan dan Penandaan TMK. Keputusan pengawasan dapat berupa rekomendasi tindak lanjut, penarikan, maupun Public Warning, dan lain-lain. Adapun Jumlah Keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan Tepat Waktu sebanyak 1203 keputusan dari 1803 keputusan hasil pengawasan kosmetik tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Capaian yang cukup tinggi karena komitmen petugas yang dapat segera menyelesaikan hasil pengawasan dengan segera dan monitoring melekat terhadap penyelesaian keputusan di tingkat pimpinan.

➤ **Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik**

IKU ini merupakan tindakan pendalaman mutu atas hasil pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik di tahun 2018. Tindakan pendalaman mutu terhadap hasil pemeriksaan dilakukan terhadap 124 sarana dari total 205 target sarana kosmetik yang diperiksa.

Target pemeriksaan dapat tercapai karena kejelian petugas evaluator dalam melakukan analisa laporan hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM di daerah, laporan aksi penertiban pasar, pengaduan masyarakat atau pelaku usaha yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus untuk pendalaman mutu, Selain itu pada tahun 2018 Direktorat Pengawasan Kosmetik menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Industri Kosmetik, dimana dokumen ini ditujukan sebagai acuan bagi petugas Balai Besar/Balai/Loka POM di daerah dalam melakukan pemeriksaan industri kosmetik. Selama tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi kosmetik untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi dan kedalaman mutu hasil pemeriksaan dengan menggunakan petunjuk pelaksanaan yang telah disusun tersebut.

➤ **Persentase laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu**

Tahun 2017, IKU ini merupakan salah satu tupoksi dari Direktorat Penilaian OT, SM dan Kosmetik, namun belum mengukur persentase dan ketepatan waktu penilaian laporan. Dengan demikian untuk Tahun 2018, Direktorat Pengawasan Kosmetik belum mempunyai baseline data untuk menetapkan target indikator ini. Target yang ditetapkan berdasarkan nilai minimum untuk kategori Baik.

Pada tahun 2018, Jumlah laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu sebanyak 131 laporan dari 197 laporan efek samping kosmetik yang masuk.

6. Capaian Sasaran Kegiatan “TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK SESUAI DENGAN ROAD MAP RB BPOM 2015 – 2019”

Pencapaian sasaran kegiatan diukur berdasarkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Nilai Capaian Sasaran 90,05% yang memenuhi kriteria **Cukup**.

Realisasi indikator kinerja ini hanya membandingkan antara target dan realisasi di tahun 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
10. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik	78	70,24	90,05%	Cukup

Realisasi yang dicapai Direktorat Pengawasan Kosmetik sebagai unit baru, merupakan capaian sebagai Direktorat Insert OT, Kosmetik dan PK, dimana berdasarkan hasil evaluasi ada beberapa komponen yang mempunyai nilai rendah, antara lain:

- Pencapaian sasaran 69,82%
- Pengukuran kinerja 57,50%
- Evaluasi internal 52,87%

Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian Direktorat Pengawasan Kosmetik untuk memperbaiki nilai akuntabilitas unit kerja di tahun 2018.

Dalam penetapan target Tahun 2019, Direktorat Pengawasan Kosmetik menetapkan bahwa target seluruh IKU **sama dengan** target Tahun 2018. Hal ini disebabkan pemotongan anggaran yang ditetapkan untuk Direktorat Pengawasan Kosmetik di bawah anggaran tahun 2018.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2018 sebesar Rp. **10.129.096.224,-** (sepuluh milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sebesar 99,56%.

Secara keseluruhan realisasi Anggaran dan Kegiatan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	REALISASI KEUANGAN		
		Rp	%	
OUTPUT: Keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu				
1	Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Kosmetika Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Pengawasan Kosmetika di Peredaran	325.512.000	322.384.220	99,04%
2	Peningkatan Kompetensi Mutu dan Keamanan Petugas	94.460.000	94.450.050	99,99%
3	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling	271.903.000	269.473.500	99,11%
4	Penanganan Terpadu Kosmetik Asemka	396.822.000	396.822.000	100,00%
5	Komunikasi Hasil Pengawasan Kosmetika Beredar dan Penyelenggaraan <i>Public Warning</i>	347.759.000	347.139.900	99,82%
6	Kampanye Cerdas Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/ Berbahaya untuk Generasi Milenial	468.690.000	468.656.050	99,99%
7	Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Informasi Kosmetik	209.852.000	208.557.991	99,38%
8	Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Promosi Kosmetik	377.814.000	377.018.208	99,79%
9	Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik Bagi Pelaku Usaha Dan Sektor Terkait	445.003.000	444.902.600	99,98%
10	Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetika Yang Baik	134.984.000	134.863.000	99,91%

NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	REALISASI KEUANGAN		
		Rp	%	
11	Penguatan Tindak Lanjut Pengawasan Kosmetik melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor	457.403.000	457.172.826	99,95%
12	Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas Informasi dan Promosi Kosmetik	97.846.000	97.050.000	99,19%
13	Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik	102.707.000	102.684.400	99,98%
14	Persiapan Pemetaan Industri Kosmetik Berbasis Analisis Risiko dan Kemampuan Menerapkan CPKB	117.845.000	117.844.575	100,00%
15	Desk CAPA (Tindak Lanjut) Hasil Inspeksi Sarana Produksi Kosmetika	129.588.000	129.522.910	99,95%
16	Penyusunan media dalam rangka peningkatan pemahaman CPKB	123.783.000	123.782.725	100,00%
17	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	251.487.000	251.481.385	100,00%
18	Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	272.945.000	272.944.054	100,00%
19	Evaluasi Efektifitas Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi	200.928.000	200.667.650	99,87%
20	Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	266.094.000	266.002.000	99,97%

	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
21	Bimbingan Teknis kepada Balai/Balai Besar POM dan Penilaian Kinerja Balai	291.931.000	290.627.850	99,55%
22	Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kinerja Direktorat Pengawasan kosmetik	299.857.000	299.810.950	99,98%
23	Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	288.279.000	286.684.404	99,45%
24	Peningkatan kerjasama lintas sektor luar negeri	47.881.000	47.871.466	99,98%
25	Komunikasi Informasi dan Edukasi Kosmetika Memenuhi Syarat	451.000.000	435.448.500	96,55%
26	Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik	305.634.000	299.957.200	98,14%
27	Inisiasi Jejaring Lintas Sektor dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Monitoring Efek Samping Kosmetika	365.154.000	363.517.950	99,55%
28	Pembahasan Hasil Pelaporan Efek Samping Kosmetika	8.550.000	8.550.000	100,00%
29	Forum Komunikasi Monitoring Efek Samping Kosmetik bagi Pelaku Usaha	77.466.000	76.927.000	99,30%
30	Piloting Forum Jejaring Lintas Sektor dalam rangka Pelaporan Efek Samping Kosmetik	148.830.000	148.729.000	99,93%
OUTPUT: Permohonan penilaian sarana dan produk kosmetika yang diselesaikan tepat waktu				
31	Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	185.948.000	185.946.000	100,00%

	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
32	Pelayanan Publik Persetujuan RIP/Denah Bangunan Sarana Produksi Kosmetik di Daerah	75.947.000	73.103.856	96,26%
33	Desk CAPA Sertifikasi CPKB	148.192.000	148.183.200	99,99%
34	Konsolidasi Pengembangan Industri UMKM Kosmetik Nasional	228.152.000	228.130.000	99,99%
35	Pemberdayaan IKM Kosmetik untuk percepatan serifikasi CPKB dalam upaya pencegahan peredaran kosmetik ilegal	66.602.000	66.601.300	100,00%
36	Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan UMKM Kosmetik	71.298.000	71.298.000	100,00%
37	Simplifikasi Denah Bangunan Sarana Produksi Kosmetika UMKM	77.625.000	77.625.000	100,00%
38	Bimbingan Teknis Denah Bangunan Sarana Produksi Bagi Petugas	228.509.000	228.497.800	100,00%
39	Partisipasi pada Kegiatan INSW dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada sarana importir kosmetika	244.546.000	244.233.100	99,87%
40	Sosialisasi Tata laksana Pelayanan Publik SKI/ SKE bagi Pelaku Usaha	217.520.000	217.468.079	99,98%
41	Intensifikasi Pengawasan post border kosmetika	130.804.000	130.181.300	99,52%
42	Tata Laksana Pelayanan Publik SKI Post Border bagi Petugas daerah	25.699.000	25.618.900	99,69%
43	Honor Pramubakti dan Pengemudi	248.352.000	248.352.000	100,00%

NAMA KEGIATAN		JUMLAH BIAYA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
44	Honorarium Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik	35.640.000	35.640.000	100,00%
45	Verifikasi DUPAK PFM Direktorat Pengawasan Kosmetik	14.496.000	13.945.650	96,20%
46	Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	26.200.000	26.131.300	99,74%
47	Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	70.442.000	70.441.875	100,00%
48	Layanan Perkantoran	88.442.000	85.256.500	96,40%
49	Bimtek SKI Pos Border Kosmetik bagi Petugas Daerah	52.216.000	52.108.100	99,79%
OUTPUT: Layanan Internal				
50	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Pengawasan Kosmetik	153.805.000	153.799.900	100,00%
51	Pengadaan Kendaraan Dinas	404.990.000	404.990.000	100,00%
		10.173.432.000	10.129.096.224	99,56%

Tingkat Efisien

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembandingan yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Input}} \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2018, setelah dilakukan pengukuran Efisiensi pada 51 (lima puluh satu) kegiatan dan diperoleh hasil bahwa 51 (lima puluh satu) kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi (TE) bervariasi antara 0,00 sampai dengan 0,14. Rincian Pengukuran Efisiensi Kegiatan pada Lampiran 5.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yang sepenuhnya mengacu pada Badan POM dan pencapaian realisasi anggaran.

Direktorat Pengawasan Kosmetika mengemban sasaran kegiatan, yaitu:

1. Sasaran kegiatan “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik” Nilai Pencapaian Sasaran 117,13% dengan kriteria **Memuaskan**.
2. Sasaran kegiatan “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik” Nilai Pencapaian Sasaran 104,13% dengan kriteria **Memuaskan**.
3. Sasaran kegiatan “Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik” Nilai Pencapaian Sasaran 106,73% dengan kriteria **Memuaskan**.
4. Sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas pembinaan terkait kosmetik” Nilai Pencapaian Sasaran 106,06% dengan kriteria **Memuaskan**.
5. Sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik berbasis risiko” Nilai Pencapaian Sasaran 103,63% dengan kriteria **Memuaskan**.
6. Sasaran kegiatan “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik sesuai dengan *road map* RB BPOM 2015 – 2019” Nilai Pencapaian Sasaran 89,92% dengan kriteria **Cukup**.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, telah dilakukan pengukuran efisiensi pada setiap kegiatan (51 kegiatan) dengan hasil bahwa tingkat efisiensi (TE) bervariasi antara 0,00 sampai dengan 0,14.

Realisasi anggaran seluruhnya tercapai sebesar Rp. **10.129.096.224,-** (sepuluh milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sebesar 99,56%.

RENCANA PERBAIKAN KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN TAHUN 2018

1. Perlunya mempertahankan kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berhasil melakukan pelayanan publik dengan baik, sehingga mendapat nilai IKM tertinggi.
2. Perlu dilakukan review renstra dan IKU untuk dapat menghasilkan *outcome* yang terukur.
3. Harus dilakukan antisipasi perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pengawasan kosmetik perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
4. Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran
5. Perlu efektivitas dan efisiensi implementasi Sistem AKIP untuk capaian *output* maupun *outcome* kegiatan berbanding lurus dengan realisasi anggaran yang digunakan sehingga laporan kinerja dan laporan keuangan merupakan satu kesatuan.
6. Simplifikasi perijinan persteujuan denah bangunan.
7. Meningkatkan KIE kosmetik aman untuk generasi milenial dan pekerja wanita untuk mengurangi pemilihan dan penggunaan kosmetik berbahaya untuk konsumen.

Lampiran 1

Rencana Kinerja Tahunan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691, 4245203 ext.1040,1041; fax: 4245203
Email : dit.waskos@gmail.com; Website : www.pom.go.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK
NOMOR HK.04.03.44.03.18.0062A
TENTANG
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK
TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan oleh setiap unit kerja eselon II;
- b. bahwa setiap dokumen Rencana Kerja Tahunan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- c. bahwa Rencana Kerja Tahunan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4664);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK TAHUN 2018**
- Pertama** : Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dan rencana strategis Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2015-2019;
- Kedua** : Rencana Kerja Tahunan merupakan panduan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018;
- Ketiga** : Rencana Kerja Tahunan 2018 sebagaimana tersebut diatas dalam lampiran Keputusan ini;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Maret 2018

Direktur Pengawasan Kosmetik



Drs. Arustiyono, Apt, MPH.
NIP.19630812 198903 1 002

Lampiran Surat Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik
Nomor: HK.04.03.44.03.18.0064 tentang Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2018

**RENCANA KERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
TAHUN 2018**

Unit Eselon II : Direktorat Pengawasan Kosmetik
Tahun Anggaran : 2018

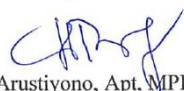
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kosmetika yang aman, bermanfaat dan bermutu melalui pengawasan sarana dan produk	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetika yang diselesaikan tepat waktu	60%
		Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetika	60%
		Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetika	60%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetika yang diselesaikan tepat waktu	86%
		Persentase laporan efek samping kosmetika yang ditindaklanjuti tepat waktu	65%

Program/Kegiatan
Pengawasan Kosmetik

Anggaran
Rp. 12.633.086.000,-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Maret 2018

Direktur Pengawasan Kosmetik


Drs. Arustiyono, Apt, MPH.
NIP.19630812 198903 1 002

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691, 4245203 ext.1040,1041; fax: 4245203
Email : dit.waskos@gmail.com; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Arustiyono, Apt., MPH
Jabatan : Direktur Pengawasan Kosmetik

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Rr. Mayagustina Andarini, M.Sc, Apt.
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

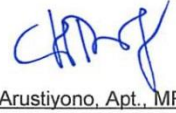
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dra. Rr. Mayagustina Andarini, M.Sc, Apt.
NIP. 19660813 199203 2 001


Drs. Arustiyono, Apt., MPH
NIP. 19630812 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT PENGAWASAAN KOSMETIK
 Periode : Januari-Februari 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan sesuai <i>Good manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Good Distribution Practices</i> (GDP)	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional yang memiliki sertifikat CPOTB	95
	Persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu atau diverifikasi	12,5%
	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	230
	Persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan TMS yang ditindaklanjuti berdasar hasil pengawasan	87,5%
	Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi	64.550
	Persentase berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	76%
Sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang sesuai GMP dan GDP	Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi	-
	Jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diinspeksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan	340
Kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu	Persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti	-
	Jumlah obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan	790

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional , Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	-
	Persentase permohonan sertifikasi OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	85
Penandaan label dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diawasi	Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti	-
	Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	5.100
	Jumlah iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi	10.150
	Jumlah label kosmetik yang diawasi	10.100
	Jumlah iklan kosmetik yang diawasi	21.150
Pelaku usaha menjamin mutu produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	95
	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	230

Program/ Kegiatan

Anggaran

Pengawasan Kosmetik


Rp. 12.633.086.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dra. Rr. Maya Agustina Andarini, M.Sc. Apt.
 NIP. 19660813 499203 2 001


Drs. Arustiyono, Apt., MPH
 NIP. 19630812 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Arustiyono, Apt., MPH
Jabatan : Direktur Pengawasan Kosmetik

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Rr. Mayagustina Andarini, M.Sc, Apt.
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dra. Rr. Mayagustina Andarini, M.Sc, Apt.
NIP. 19660813 199203 2 001


Drs. Arustiyono, Apt., MPH
NIP. 19630812 198903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kosmetika yang aman, bermanfaat dan bermutu melalui pengawasan sarana dan produk	Persentase keputusan hasil pengawasan Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu	60%
	Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetika	60%
	Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetika	60%
	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu	86%
	Persentase laporan efek samping kosmetika yang ditindaklanjuti tepat waktu	65%

Program/ Kegiatan

Pengawasan Kosmetik

Anggaran

Rp. 12.633.086.000,-

Pihak Kedua



Dra. Mayagustina Andarini, Apt, MSc
NIP. 19660813 199203 2 001

Pihak Pertama



Drs. Arustiyono, Apt., MPH
NIP. 19630812 198903 1 002

**RENCANA ASKI PERJANJIAN KINERJA
 DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
 TAHUN 2018**


NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1	Meningkatnya kosmetika yang aman, bermanfaat dan bermutu melalui pengawasan sarana dan produk	Persentase keputusan hasil pengawasan Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu	60%	60%	60%	60%				
		Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetika	60%	60%	60%	60%				
		Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetika	-	-	-	60%				
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu	86%	86%	86%	86%				
		Persentase laporan efek samping kosmetika yang ditindaklanjuti tepat waktu	65%	65%	65%	65%				

Jakarta, 2 Maret 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama


 Dra. Mayagustina Andarini., Apt., MSc
 NIP. 19660813 199203 2 001


 Drs. Arustiyono, Apt., MPH
 NIP. 19630812 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Arustiyono, Apt., MPH
Jabatan : Direktur Pengawasan Kosmetik

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Rr. Mayagustina Andarini, M.Sc, Apt.
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dra. Rr. Mayagustina Andarini, M.Sc, Apt.
NIP. 19660813 199203 2 001


Drs. Arustiyono, Apt., MPH
NIP. 19630812 198903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
 PERIODE JULI-DESEMBER 2018**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	75
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik	Indeks kepatuhan sarana produksi kosmetik	60
	Indeks kepatuhan sarana distribusi kosmetik	60
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	86%
Meningkatnya kualitas pembinaan terkait kosmetik	Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetik	60%
Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik yang dilaksanakan	55
	Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetika	60%
	Persentase laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	65%
	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetika yang diselesaikan tepat waktu	60%
Terwujudnya RB Direktorat Pengawasan Kosmetik sesuai dengan <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik	70

Program/ Kegiatan

Anggaran

Rp. 10.173.432.000,-

Pihak Kedua

Tanggal, Juli 2019
 Pihak Pertama

Dra. Dra. Mayagustina Andarini, Apt, MSc.
 19660813 199203 2 001

Drs. Arustiyono, Apt., MPH NIP.
 NIP. 19630812 198903 1 002

**RENCANA ASKI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
TAHUN 2018**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI					
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12		
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)		
1	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik				75						
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik	Indeks kepatuhan sarana produksi kosmetik				60						
		Indeks kepatuhan sarana distribusi kosmetik				60						
3	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	86%	86%	86%	86%						
	Meningkatnya kualitas pembinaan terkait kosmetik	Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetik				60%						
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik yang dilaksanakan				55						
		Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetika	60%	60%	60%	60%						
		Persentase laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	65%	65%	65%	65%						
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetika yang diselesaikan tepat waktu	60%	60%	60%	60%						

Lampiran 3

Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Skala Nasional Tahun 2017

IKPU Berdasarkan Produk	2017
Suplemen Kesehatan	75.31
Obat	67.32
Kosmetik	62.48
Pangan Olahan	61.17
Obat Tradisional	60.68
IKPU Skala Nasional	65.25

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja Kegiatan (Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran)

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	%	REALISASI FISIK	Jumlah	%	Total PAGU per output	Total Realisasi Per Output	% per output
			Rp		Target					
OUTPUT : 001										
KEPUTUSAN HASIL PENGAWASAN KOSMETIKA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU								7.378.007.000	7.341.544.364	99,51
1	Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Kosmetika Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Pengawasan Kosmetika di Peredaran	325.512.000	322.384.220	99,04%	5x Pertemuan di Balai	5	100%			
					11 Tr Pengadaan Sampel	11	100%			
					11 Tr ke Daerah	11	100%			
					5 Tr ke Bodetabek	5	100%			
					5 Tr ke Jakarta	5	100%			
2	Peningkatan Kompetensi Mutu dan Keamanan Petugas	94.460.000	94.450.050	99,99%	1x Pelatihan	1	100%			
3	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling	271.903.000	269.473.500	99,11%	1x Pertemuan	1	100%			
4	Penanganan Terpadu Kosmetik Asemka	396.822.000	396.822.000	100,00%	1x Pertemuan FGD	1	100%			
					1x Bimtek	1	100%			
5	Komunikasi Hasil Pengawasan Kosmetika Beredar dan Penyelenggaraan Public Warning	347.759.000	347.139.900	99,82%	1x Pertemuan Public Warning	1	100%			

6	Kampanye Cerdas Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/ Berbahaya untuk Generasi Milenial	468.690.000	468.656.050	99,99%	1x Pertemuan	1	100%
7	Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Informasi Kosmetik	209.852.000	208.557.991	99,38%	12x rapat pembahasan	12	100%
					7 Tr ke daerah	7	100%
					3 Tr ke Bodetabek	4	133%
					11 Tr ke Jakarta	13	118%
					6x pertemuan	5	83%
					5x RDK	5	100%
8	Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Promosi Kosmetik	377.814.000	377.018.208	99,79%	7x rapat pembahasan	7	100%
					6 paket monitoring iklan melalui pihak ketiga	6	100%
					6 paket pengadaan Majalah dan Koran	6	100%
					10 Tr ke daerah	11	110%
					7 Tr ke bodetabek	7	100%
					7 Tr ke Jakarta	7	100%
					8x pertemuan	8	100%
					3x RDK	3	100%
9	Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik Bagi Pelaku Usaha Dan Sektor Terkait	445.003.000	444.902.600	99,98%	5x rapat pembahasan	5	100%
					1 Tr ke daerah	1	100%
					1 trip perjalanan dinas bodetabek	1	100%
					2 kali fullday meeting luar kota	2	100%
					1 kali fullday meeting dalam kota	1	100%
					1 paket penyelenggaraan pihak ketiga	1	100%
					3 kali RDK	3	100%

10	Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetika Yang Baik	134.984.000	134.863.000	99,91%	5x rapat pembahasan	5	100%
					1x kegiatan pemberdayaan	1	100%
					2x RDK	2	100%
11	Penguatan Tindak Lanjut Pengawasan Kosmetik melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor	457.403.000	457.172.826	99,95%	4x rapat pembahasan	4	100%
					1x pelaksanaan	1	100%
					15 Tr ke daerah	16	107%
					6 Tr ke Jakarta	6	100%
					3x pertemuan	3	100%
2x RDK	2	100%					
12	Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas Informasi dan Promosi Kosmetik	97.846.000	97.050.000	99,19%	3 Tr ke Jakarta	4	133%
					1x rapat pembahasan	1	100%
					1x pertemuan	1	100%
					1 Tr ke daerah	1	100%
4 biaya Registrasi	4	100%					
13	Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik	102.707.000	102.684.400	99,98%	3x Pertemuan	3	100%
14	Persiapan Pemetaan Industri Kosmetik Berbasis Analisis Risiko dan Kemampuan Menerapkan CPKB	117.845.000	117.844.575	100,00%	2x Pertemuan	2	100%
15	Desk CAPA (Tindak Lanjut) Hasil Inspeksi Sarana Produksi Kosmetika	129.588.000	129.522.910	99,95%	1x Pertemuan	1	100%
16	Penyusunan media dalam rangka peningkatan pemahaman CPKB	123.783.000	123.782.725	100,00%	1x Pertemuan	1	100%
					1x Pembuatan Media dalam rangka peningkatan pemahaman CPKB	1	100%
17	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	251.487.000	251.481.385	100,00%	1x Pertemuan	1	100%
					3x pertemuan dalam kota	3	100%
18		272.945.000	272.944.054	100,00%	14 Tr ke Daerah	14	100%

--	--	--	--	--	--	--	--

	Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat				21 Tr ke Bodetabek	21	100%
					26 Tr ke Jakarta	26	100%
					3 x RDK	3	100%
19	Evaluasi Efektifitas Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi	200.928.000	200.667.650	99,87%	1x Pertemuan	1	100%
20	Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	266.094.000	266.002.000	99,97%	1x Pertemuan	1	100%
21	Bimbingan Teknis kepada Balai/Balai Besar POM dan Penilaian Kinerja Balai	291.931.000	290.627.850	99,55%	1x Pertemuan	1	100%
22	Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kinerja Direktorat Pengawasan kosmetik	299.857.000	299.810.950	99,98%	1x Pertemuan	1	100%
23	Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	288.279.000	286.684.404	99,45%	17 Tr ke Daerah	17	100%
					35 Tr ke Jakarta	35	100%
24	Peningkatan kerjasama lintas sektor luar negeri	47.881.000	47.871.466	99,98%	1 Tr ke Luar Negeri	1	100%
25	Komunikasi Informasi dan Edukasi Kosmetika Memenuhi Syarat	451.000.000	435.448.500	96,55%	4x Pertemuan	4	100%
26	Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik	305.634.000	299.957.200	98,14%	1 Kali Pertemuan	1	100%

--	--	--	--	--	--	--	--

27	Inisiasi Jejaring Lintas Sektor dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Monitoring Efek Samping Kosmetika	365.154.000	363.517.950	99,55%	4x Pertemuan	4	100%			
28	Pembahasan Hasil Pelaporan Efek Samping Kosmetika	8.550.000	8.550.000	100,00%	1x Pertemuan	1	100%			
29	Forum Komunikasi Monitoring Efek Samping Kosmetik bagi Pelaku Usaha	77.466.000	76.927.000	99,30%	1x Pertemuan	1	100%			
30	Piloting Forum Jejaring Lintas Sektor dalam rangka Pelaporan Efek Samping Kosmetik	148.830.000	148.729.000	99,93%	1x Pertemuan	1	100%			
OUTPUT : 002										
PERMOHONAN PENILAIAN SARANA DAN PRODUK KOSMETIKA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU								2.236.630.000	2.228.761.960	99,65
31	Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	185.948.000	185.946.000	100,00%	1x pertemuan di balai	1	100%			
					11 Tr ke Daerah	10	100%			
					13 Tr ke Bodetabek	14	108%			
					5 Tr ke Jakarta	5	100%			
					2 x RDK	2	100%			
32	Pelayanan Publik Persetujuan RIP/Denah Bangunan Sarana Produksi Kosmetik di Daerah	75.947.000	73.103.856	96,26%	5x pelayanan RIP di kantor	6	120%			
					1x pelayanan RIP di daerah	1	100%			
33	Desk CAPA Sertifikasi CPKB	148.192.000	148.183.200	99,99%	2x Pertemuan	2	100%			

34	Konsolidasi Pengembangan Industri UMKM Kosmetik Nasional	228.152.000	228.130.000	99,99%	1x Pertemuan	1	100%
35	Pemberdayaan IKM Kosmetik untuk percepatan serifikasi CPKB dalam upaya pencegahan peredaran kosmetik ilegal	66.602.000	66.601.300	100,00%	1x Pertemuan	1	100%
36	Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan UMKM Kosmetik	71.298.000	71.298.000	100,00%	1x Pertemuan	1	100%
37	Simplifikasi Denah Bangunan Sarana Produksi Kosmetika UMKM	77.625.000	77.625.000	100,00%	1x Pertemuan	1	100%
38	Bimbingan Teknis Denah Bangunan Sarana Produksi Bagi Petugas	228.509.000	228.497.800	100,00%	1x Bimtek di Bodetabek	1	100%
					1 x Pertemuan dalam kota	1	100%
					1 x RDK	1	100%
39	Partisipasi pada Kegiatan INSW dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada sarana importir kosmetika	244.546.000	244.233.100	99,87%	115 Tr ke Jabodetabek	119	103%
40	Sosialisasi Tata laksana Pelayanan Publik SKI/ SKE bagi Pelaku Usaha	217.520.000	217.468.079	99,98%	2x Pertemuan	2	100%
41	Intensifikasi Pengawasan post border kosmetika	130.804.000	130.181.300	99,52%	8 Tr ke Daerah	8	100%
42	Tata Laksana Pelayanan Publik SKI Post Border bagi Petugas daerah	25.699.000	25.618.900	99,69%	1x Pertemuan	1	100%

43	Honor Pramubakti dan Pengemudi	248.352.000	248.352.000	100,00%	7 Bulan Honor	7	100%			
44	Honorarium Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik	35.640.000	35.640.000	100,00%	6 Bulan Honor	6	100%			
45	Verifikasi DUPAK PFM Direktorat Pengawasan Kosmetik	14.496.000	13.945.650	96,20%	1x Pertemuan	1	100%			
46	Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	26.200.000	26.131.300	99,74%	1x Pertemuan	1	100%			
47	Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedepuitan II	70.442.000	70.441.875	100,00%	6x RDK	6	100%			
					2x Pertemuan	2	100%			
48	Layanan Perkantoran	88.442.000	85.256.500	96,40%	6 bulan kebutuhan perkantoran	6	100%			
49	Bimtek SKI Pos Border Kosmetik bagi Petugas Daerah	52.216.000	52.108.100	99,79%	1x Pertemuan	1	100%			
OUTPUT : 951 LAYANAN INTERNAL								558.795.000		
								558.795.000	558.789.900	100,00
50	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Pengawasan Kosmetik	153.805.000	153.799.900	100,00%	10 Unit Printer	10	100%			
					3 Unit Printer Portable	3	100%			
					9 Unit Komputer	9	100%			

51	Pengadaan Kendaraan Dinas	404.990.000	404.990.000	100,00%	1x Pengadaan mobil	1	100%			
TOTAL		10.173.432.000	10.129.096.224	99,56%				10.173.432.000	10.129.096.224	99,56

Lampiran 5

Pengukuran Tingkat Efisiensi

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN

UNIT ESELON II : Direktorat Pengawasan Kosmetik

Tahun : 2018

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA% CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
Meningkatnya kosmetik yang aman, bermanfaat dan bermutu melalui pengawasan sarana dan produk	KEPUTUSAN HASIL PENGAWASAN KOSMETIKA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	99,61%	100,5%	1,01	1	Efisien	0,01
	Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Kosmetika Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Pengawasan Kosmetika di Peredaran	99,04%	100,00%	1,01	1	Efisien	0,01
	Peningkatan Kompetensi Mutu dan Keamanan Petugas	99,99%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling	99,11%	100,00%	1,01	1	Efisien	0,01
	Penanganan Terpadu Kosmetik Asemka	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	Komunikasi Hasil Pengawasan Kosmetika Beredar dan Penyelenggaraan Public Warning	99,82%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	Kampanye Cerdas Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/ Berbahaya untuk Generasi Milenial	99,99%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Informasi Kosmetik	99,38%	105,80%	1,06	1	Efisien	0,06
	Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Promosi Kosmetik	99,79%	101,25%	1,01	1	Efisien	0,01
	Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik Bagi Pelaku Usaha Dan Sektor Terkait	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetika Yang Baik	99,91%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	Penguatan Tindak Lanjut Pengawasan Kosmetik melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor	99,95%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00

Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas Informasi dan Promosi Kosmetik	99,19%	106,60%	1,07	1	Efisien	0,07
Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Persiapan Pemetaan Industri Kosmetik Berbasis Analisis Risiko dan Kemampuan Menerapkan CPKB	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Desk CAPA (Tindak Lanjut) Hasil Inspeksi Sarana Produksi Kosmetika	99,95%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Penyusunan media dalam rangka peningkatan pemahaman CPKB	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Evaluasi Efektifitas Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi	99,87%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99,97%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Bimbingan Teknis kepada Balai/Balai Besar POM dan Penilaian Kinerja Balai	99,55%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kinerja Direktorat Pengawasan kosmetik	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	99,45%	100,00%	1,01	1	Efisien	0,01
Peningkatan kerjasama lintas sektor luar negeri	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Komunikasi Informasi dan Edukasi Kosmetika Memenuhi Syarat	96,55%	100,00%	1,04	1	Efisien	0,04
Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik	98,14%	100,00%	1,02	1	Efisien	0,02
Inisiasi Jejaring Lintas Sektor dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Monitoring Efek Samping Kosmetika	99,55%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Pembahasan Hasil Pelaporan Efek Samping Kosmetika	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Forum Komunikasi Monitoring Efek Samping Kosmetik bagi Pelaku Usaha	99,30%	100,00%	1,01	1	Efisien	0,01
Piloting Forum Jejaring Lintas Sektor dalam rangka Pelaporan Efek Samping Kosmetik	99,93%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
PERMOHONAN PENILAIAN SARANA DAN PRODUK KOSMETIKA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	99,65%	100,79%	1,01	1	Efisiensi	0,01

Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	100,00%	101,54%	1,02	1	Efisien	0,02
Pelayanan Publik Persetujuan RIP/Denah Bangunan Sarana Produksi Kosmetik di Daerah	96,26%	110,00%	1,14	1	Efisien	0,14
Desk CAPA Sertifikasi CPKB	99,99%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Konsolidasi Pengembangan Industri UMKM Kosmetik Nasional	99,99%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Pemberdayaan IKM Kosmetik untuk percepatan serifikasi CPKB dalam upaya pencegahan peredaran kosmetik ilegal	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan UMKM Kosmetik	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Simplifikasi Denah Bangunan Sarana Produksi Kosmetika UMKM	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Bimbingan Teknis Denah Bangunan Sarana Produksi Bagi Petugas	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Partisipasi pada Kegiatan INSW dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada sarana importir kosmetika	99,87%	103,48%	1,04	1	Efisien	0,04
Sosialisasi Tata laksana Pelayanan Publik SKI/ SKE bagi Pelaku Usaha	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Intensifikasi Pengawasan post border kosmetika	99,52%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Tata Laksana Pelayanan Publik SKI Post Border bagi Petugas daerah	99,69%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Honor Pramubakti dan Pengemudi	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Honorarium Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Verifikasi DUPAK PFM Direktorat Pengawasan Kosmetik	96,20%	100,00%	1,04	1	Efisien	0,04
Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	99,74%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Layanan Perkantoran	96,40%	100,00%	1,04	1	Efisien	0,04
Bimtek SKI Pos Border Kosmetik bagi Petugas Daerah	99,79%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
LAYANAN INTERNAL	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Pengawasan Kosmetik	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisiensi	0,00
TOTAL RATA-RATA			1,01	1	Efisiensi	0,01